Optimalisasi Hukum Terhadap Lessee Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing

Optimization Of The Law Against Lessee Who Defaulted In The Leasing Agreement

Rianda Dirkareshza ^{1)*}, Taupiqqurrahman ^{2)*} & Davilla Prawidya Azaria ^{3)*}

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

Diterima: Juni 2021; Disetujui: Desember 2021; Dipublish: Desember 2021

*Corresponding Email: riandadirkareshza@upnvj.ac.id, taupiqqurrahman@upnvj.ac.id, dp.azaria@upnvj.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian *leasing* dimana terdapat tahapan yang harus ditempuh oleh *Lessor*, yakni pemberian peringatan somasi, memberikan kebijaksanaan kredit, hingga menyita objek jaminan dengan bantuan *debt collector*. Disahkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengubah penyitaan objek jaminan yang semula dilakukan secara langsung, kini diperlukan proses dan putusan pengadilan dalam eksekusinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis menggunakan pendekatan hukum doktrinal, teknik pengumpulan data dengan studi dokumentasi data dan wawancara *staff leasing*, dianalisis secara kualitatif yang membahas mengenai penegakan hukum terhadap *Lessee* yang melakukan wanprestasi dan optimalisasi terhadap *Lessee* yang melakukan wanprestasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur yang harus ditempuh oleh *Lessor* terlebih dahulu dalam proses penyelesaian tindakan *Lessee* yang wanprestasi yakni pemberian peringatan somasi, memberikan kebijaksanaan kredit, hingga menyita objek jaminan dengan bantuan pihak ketiga atau *debt collector*. Hal ini guna meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan eksekutorial serta mengakomodir hak-hak yang dimiliki oleh *Lessor* sebagai penyumbang pajak dan mempercepat roda perekonomian bangsa.

Kata Kunci: Leasing; Fidusia; Perjanjian; Wanprestasi.

Abstract

This study aims to determine the settlement of default in the leasing agreement where there are steps that must be taken by the lessor, namely giving a summons warning, providing credit policy, to seizing the object of collateral with the help of debt collectors. The ratification of the Supreme Court's Decision Number 18/PUU-XVII/2019 changes the confiscation of the object of collateral which was originally carried out directly, now requires a court process and decision in its execution. This research is a normative juridical law research that is descriptive analytical using a doctrinal legal approach, data collection techniques with data documentation studies and interviews of leasing staff, qualitatively analyzed which discusses law enforcement against Lessees who default and optimizes Lessees who default. The results of the study indicate that the procedures that must be taken by the Lessor first in the process of resolving the Lessee's actions in default are giving a subpoena warning, providing credit policy, to seizing the object of collateral with the help of a third party or debt collector. This is in order to increase effectiveness in the execution of executions and to accommodate the rights of the Lessor as a tax contributor and accelerate the wheels of the nation's economy.

Keywords: Leasing; Fiduciary; Agreement; Default.

How to Cite: Dirkareshza, R. Taupiqqurrahman. & Azaria, D.P. (2021). Optimalisasi Hukum Terhadap Lessee Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8 (2) 2021 : 160-173

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian global memaksa setiap negara untuk Menyusun kebijakan yang dapat mempercepat pertumbuhan perekonomian suatu negara itu sendiri. *Leasing* telah menjadi alternatif yang populer untuk membeli sebagai sarana bagi konsumen untuk mendapatkan dan menggunakan mobil, furnitur, dan barang tahan lama lainnya (Cooluris, 1982). Di dalam perusahaan pembiayaan terdapat bentuk-bentuk produk multifinance beberapa diantaranya leasing, consumer finance, factoring dan pembiayaan tunai.(Yulianti, 2019)

Di Belanda penggunaan istilah bahasa Inggris '*lease*' atau '*leasing*' tidak terbatas pada arti hukum tertentu. Sebaliknya, ini adalah istilah ekonomi yang digunakan untuk menggambarkan pengaturan pembiayaan yang memiliki karakteristik tertentu. Secara umum, leasing melibatkan satu pihak (*Lessor*) yang memberikan penggunaan barang modal tertentu kepada pihak lain (*Lessee*) dengan imbalan pembayaran (*periodik*) tertentu (Faber & Schuijling, 2007). Leasing di Indonesia mulai muncul pertama kali pada tahun 1974. Pada awal kemunculannya leasing tidak menunjukkan suatu perkembangan yang berarti, hingga tahun 1980 jumlah perusahaan leasing yang ada sebanyak 5 buah, dan meningkat pada tahun 1981 menjadi 8 buah perusahaan, dan mencapai puncaknya pada akhir tahun 1984 dengan jumlah perusahaan sebanyak 48 buah. Hal yang menggembirakan adalah bahwa peningkatan ini juga diiringi dengan peningkatan besarnya kontrak leasing, yaitu sebanyak Rp. 436,10 milyar, padahal leasing di Indonesia adalah lembaga yang baru dan belum diatur dalam suatu undang-undang khusus. Bahkan sampai saat ini yang ada barulah berbentuk Keputusan Presiden maupun Keputusan Menteri Keuangan yang pada mulanya hanya mengatur segi-segi yuridis

administratif serta perlakuan perpajakan terhadap usaha leasing.(Waode, 2018)

Perjanjian leasing ini nampak semakin populer dengan semakin berkembangnya industri dan perdagangan di Indonesia, di dalam leasing dikatakan bahwa *Lessee* adalah pemilik ekonomi, dari barang yang disewanya, karena ia mendapatkan segala manfaat dari barang, sedangkan resiko tentang rusak atau musnahnya barang dipikul oleh *Lessor* (pihak yang memberikan pembiayaan dengan cara leasing kepada pihak yang membutuhkannya). Dalam operasional leasing, leasing terima jadi barangnya (alat transportasi) termasuk pemeliharaannya (*service*) dan dalam financial leasing, *Lessee* memesan sendiri barangnya atas biaya *Lessor*. Dalam hal terakhir ini lazimnya biaya pemeliharaan dan tanggungan (asuransi) dibebankan kepada *Lessee*.(Waode, 2018)

Penjualan leasing merupakan kontrak dimana biaya sewa untuk jangka waktu tertentu dan jika salah satu pihak membayar sewa tersebut menjadi transaksi jual beli terhadap sewa yang dibayar. Hal ini dianggap sebagai pengingat agar objek *leasing* dapat dilunasi hingga jangka waktu tertentu sesuai perjanjian antara pihak *Lessee* dengan *Lessor*. Pada umumnya jenis kontrak ini untuk melindungi dirinya dari resiko objek yang dikontrak oleh pihak *Lessee* (Mohamedien, 2002). Hal ini tidak menjadi jaminan kepada *Lessor* agar *Lessee* yang berkontrak untuk taat kepada perjanjian yang menjadi Undang-Undang kedua belah pihak. Dalam praktiknya terdapat banyak Tindakan melawan kontrak tersebut yang dilakukan oleh *Lessee*, yang paling sering terjadi adalah wanprestasi dalam pembayaran tunggakan/cicilan/angsuran yang seharusnya diselesaikan setiap bulannya hingga jangka waktu tertentu.

Berdasarkan data Direktorat Pemberdayaan Konsumen Kemendag, sebanyak 1.354 kasus sengketa

pembiayaan leasing terjadi dalam kurun tiga tahun terakhir. Rinciannya, 366 kasus pada 2017, 571 kasus pada 2018, dan 417 kasus pada 2019.(Hrf/sfr, 2020) Angka ini menunjukkan bahwa tingginya angka Tindakan melawan hukum yang dilakukan *Lessee*, apabila tidak merumuskan sebuah terobosan dalam kebijakan hukum angka ini akan terus meningkat. Perlu diadakan kebijakan hukum yang mempertegas sanksi yang dibebankan kepada *Lessee* dan tidak melulu memberikan tambahan aturan yang berisikan sanksi terhadap *Lessor*.

Karakterisasi transaksi baik sebagai "sewa" yang sebenarnya atau transaksi atas tindakan tersebut kemungkinan akan berdampak pada hak dan pemulihan yang diduga dilakukan *Lessor* sehubungan dengan perhitungan ganti rugi yang dapat ditanggung berdasarkan transaksi dokumen serta nilai sisa dari objek *lease*, khususnya jika *Lessee* mengajukan pailit (Gross, Liberatore, & Whelan, 2015). Pada permulaan, leasing) seringkali sangat meningkatkan sumber daya yang tersedia untuk bisnis yang seharusnya bergantung pada investasi ekuitas dan pinjaman: *Lessor* dilindungi oleh kepemilikannya atas properti dan karenanya tidak mewajibkan pembayaran harga pembelian, jaminan pribadi pemilik bisnis, hipotek atas properti nyata bisnis, atau pengaturan serupa (Peter, 2010).

Adapun contoh terhadap benda bergerak atau benda tidak bergerak yang disewa guna usahakan berada di New York, *Lessor* akan dihadapkan pada banyak hal yang wajib dikerjakan. Padahal tren hukum negara bagian jelas jauh dari membebani *Lessor* dari tanggung jawab, ada sejumlah solusi praktis yang dapat diterapkan untuk dapat mengurangi risiko sewa guna usaha di New York. Antara lain adalah *Lessor* dapat: (i) menghentikan tanggung jawab agunan konsumen, (ii) mengubah kontrak sewa guna mencegah penggunaan kendaraan di negara bagian

sebagai tanggung jawab perwakilan yang tidak terbatas, (iii) menggeser biaya tanggung jawab pengganti ke *Lessee*, (iv) mensyaratkan agar *Lessee* mempertahankan tingkat asuransi yang diamanatkan oleh undang-undang dan menerapkan prosedur pelacakan asuransi, (v) mentransfer hak kepemilikan atas kendaraan yang di *lease*, (vi) menawarkan kontrak penjualan angsuran baru, (vii) memastikan bahwa *Lessor* tidak menciptakan hubungan keagenan dengan *Lessee*, dan (viii) mengejar keputusan legislatif untuk mencabut atau mengubah tanggung jawab perwakilan yang tidak terbatas atas undang-undang di New York (Rojc & Stendahl, 2004). Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia dapat mencontoh kebijakan terkait *leasing* yang berada di New York. Hal ini bermaksud untuk dapat mengoptimalkan percepatan perekonomian di Indonesia.

Kemampuan *Lessor* untuk memiliki kembali suatu aset merupakan manfaat utama dari leasing. Kemampuan untuk memiliki kembali ini memungkinkan *Lessor* untuk secara implisit memberikan lebih banyak kredit daripada pemberi pinjaman yang klaimnya dijamin dengan aset yang sama. Kapasitas hutang leasing dengan demikian melebihi kapasitas hutang pinjaman terjamin. Hal ini membuat leasing menjadi berharga bagi perusahaan yang memiliki keterbatasan finansial.(Eisfeldt, Rampini, Eisfeldt, & Rampini, 2009, p. 1621) Akan tetapi, *Lessor* dapat menolak perjanjian terhadap suatu benda karena ketidaksesuaian dengan penawaran kontrak. Penolakan tersebut oleh *Lessor*, jika ia adalah pembeli/*Lessee*.(Breslauer, 1992).

Di lapangan sering terjadi keterlambatan pembayaran atau bahkan perpindahan hak oleh *Lessee* karena sebab ekonomi, dengan terpaksa untuk efisiensi mengalihkan baik melalui sewa menyewa maupun pengalihan dalam konteks jual beli obyek leasing kepada

pihak lain, tindakan ini berakibat hukum, terhadap perjanjian pembiayaan leasing yang dibuat antara *Lessee* dan *Lessor*, maupun akibat hukum terhadap obyek leasing serta menyangkut hak-hak pihak ketiga yang menerima pengalihan tersebut. (Bhudiman, 2016)

Minimnya penelitian mengenai perjanjian *leasing* yang lebih berpihak kepada *Lessor* menginspirasi peneliti untuk meneliti tema penelitian. Demi menggali informasi serta data konkrit mengenai data data valid mengenai *leasing* penulis akan melakukan wawancara di PT. Astra Sedaya Finance. Berkaitan dengan hal tersebut hasil dari penelitian ini akan menjadi rekomendasi kepada pemerintah mengenai kebijakan hukum yang lebih ringkas dan tidak berat sebelah hanya melindungi hak-hak *Lessee* semata, namun juga tetap mengakomodir hak-hak dari *Lessor* sebagai penyumbang pajak dan mempercepat roda perekonomian bangsa.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut (Ashshofa, 2010).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentasi terhadap data sekunder yang diperoleh. Untuk melengkapi data, penulis juga melakukan

wawancara dengan beberapa staff PT. Astra Sedaya Finance, di Kantor pusat D.K.I Jakarta. Data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif-analitis-preskriptif. Teknik penarikan kesimpulan dilakukan secara Induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum terhadap *Lessee* yang melakukan wanprestasi

Hubungan *Lessor* dan *Lessee* adalah hubungan timbal balik, menyangkut pelaksanaan kewajiban dan peralihan suatu hak atau tuntutan kewajiban dari kenikmatan menggunakan fasilitas pembiayaan, untuk itu antara *Lessor* dan *Lessee* dibuat perjanjian financial lease/kontrak leasing atau suatu perjanjian pembiayaan. Bagi *Lessor*, keuntungan yang hendak dicapai dalam perjanjian financial lease dengan Pembeli/*Lessee*, semata-mata bertumpu pada terciptanya kepastian hukum terhadap suatu perjanjian, tentang serangkaian pembayaran oleh *Lessee* atas penggunaan aset yang menjadi obyek lease, termasuk pengakuan *Lessee* tentang penguasaan obyek oleh *Lessee* yang kepemilikannya tetap dipegang oleh *Lessor*, sehingga melahirkan hak secara hukum bagi *Lessor*, bila terjadi wanprestasi oleh *Lessee* untuk menjual atau menyita obyek lease (Sunaryo, 2008).

Terjadinya wanprestasi yang disebabkan karena tidak terlaksananya kewajiban *Lessee* seperti yang diperjanjikan merupakan salah satu contoh dari masalah-masalah dalam hubungan *Lessor* dengan *Lessee* dan itu merupakan resiko usaha yang dilakukan oleh *Lessee* dengan mengabaikan isi perjanjian yang telah disepakati. Perjanjian leasing dibuat antara *Lessor* dan *Lessee* disebut dengan lease agreement dan dalam perjanjian tersebut memuat beberapa hal antara lain: (Silondae & Fariana, 2010)

- a. Nama dan alamat Pembeli/Lessee
- b. Jenis barang modal yang diinginkan
- c. Jumlah atau nilai barang yang di-leasing-kan
- d. Syarat-syarat pembayaran
- e. Syarat-syarat kepemilikan atau syarat lainnya
- f. Biaya-biaya yang dikenakan
- g. Sanksi-sanksi apabila Pembeli/Lessee ingkar janji (wanprestasi).

Dalam perjanjian leasing terdapat hak pilih yaitu *Operating Lease* dan *Financial Lease*. *Operating Lease* adalah leasing yang dalam usahanya tidak ada opsi membeli obyek atau benda leasing kepada Lessee tetapi sekedar hanya menyewa dan pada akhir masa kontrak Lessee dapat memperpanjang sewa atau tidak dan obyek leasing yang pada akhir masa kontrak kembali kepada Lessor, sebagai pemilik dan Lessee hanya penyewa. Sedangkan *Financial Lease* adalah opsi beli atau menyewa kembali obyek leasing kepada Lessee tetap ada, tinggal Lessee berkehendak membeli atau tetap menyewa. Hal tersebut diatur di dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha atau Leasing dalam Pasal 1 huruf a, menyatakan bahwa:

"suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi financial lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk dipergunakan oleh Lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembiayaan secara berkala" (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 1991)

PT Astra Sedaya Finance atau yang disebut ("PT ASF") merupakan perusahaan pembiayaan mobil dan alat berat yang didirikan pada 15 juli 1982 beralamat di ACC Building, Jl. Let, Jend TB Simatupang, Kav 90, Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2018 tentang

Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, PT ASF memiliki 4 (empat) produk usaha di bidang Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna dan Sewa Operasi (*Operating Lease*), baik dengan skema konvensional maupun syariah. (ACC, 2020)

Setiap kegiatan yang dilakukan PT ASF dimuat dan disepakati perjanjian-perjanjian guna tercapainya kepastian hukum dan dapat berjalan sesuai dengan sistematis sesuai kehendak para pihak. Namun tidak selamanya perjanjian tersebut berjalan sesuai rencana karena ada kalanya salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya atau cidera janji.(Triwanto, 2019, p. 354) Seperti halnya dengan perjanjian leasing yang dilakukan oleh PT ASF selaku Lessor dengan Lessee/Pembeli. Seringkali hubungan Lessor dan Lessee hanya harmonis pada awal perjanjian, selanjutnya hubungan Lessor dan Lessee diwarnai berbagai persoalan dan yang utama serta paling sering adalah tertundanya pemenuhan kewajiban dari Lessee pada Lessor.(Bhudiman, 2016, p. 2)

Tidak terlaksananya kewajiban Lessee/Pembeli seperti yang diperjanjikan, merupakan tindakan wanprestasi yang dalam perusahaan leasing merupakan resiko usaha, bahkan tidak jarang Lessor kehilangan obyek leasing. Tindakan tersebut sangat merugikan perusahaan pembiayaan. Sehingga PT ASF memiliki mekanisme penanganan Lessee/Pembeli yang melakukan wanprestasi. Dalam perjanjian sewa guna usaha, wanprestasi dapat saja terjadi jika:(Aprilianti, 2015)

- a. Lessee lalai membayar sejumlah uang angsuran yang telah ditetapkan dalam perjanjian
- b. Lessee tidak melaksanakan kewajiban pembayaran biaya-biaya serta ongkos-ongkos lain atau denda keterlambatan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan;

- c. *Lessee* telah melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian, seperti mengalihkan hak pada orang lain, menyewagunausahakan ulang, menggadaikan barang objek perjanjian.

Dalam hal *Lessee* melakukan wanprestasi seperti di atas, maka tindakan yang dilakukan PT ASF selaku *Lessor* adalah mengirimkan somasi yaitu surat peringatan kepada *Lessee* sebanyak 3x (tiga kali) bahwa *Lessee* harus memenuhi kewajibannya pada tanggal yang telah ditetapkan. Jika setelah diberi somasi, pihak *Lessee* tidak juga melaksanakan kewajibannya maka perusahaan pembiayaan PT ASF memberikan kebijaksanaan kredit. Kebijakan tersebut dapat berupa mediasi dengan *Lessee* apakah *Lessee* sedang mempunyai permasalahan keuangan seperti di PHK atau masalah lainnya. Maka PT ASF melakukan beberapa kebijakan, diantaranya adalah:

- a. Perusahaan pembiayaan melakukan rescheduling yaitu penjadwalan ulang dengan memundurkan hari atau tanggal dari jatuh tempo yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan perpanjangan, misalnya jatuh tempo bulan Juli menjadi jatuh tempo bulan Desember;
- b. Memberikan kesempatan over credit yaitu penggantian debitur baru yang bersedia membayar kewajiban debitur lama dengan persetujuan perusahaan pembiayaan, debitur lama, dan debitur baru;
- c. Melakukan Cessie yaitu pengalihan hak atas kebendaan bergerak tak berwujud yang biasanya berupa piutang atas nama kepada pihak ketiga, dimana seseorang menjual hak tagihannya kepada orang lain. Pihak ketiga sebagai kreditur baru berhak melakukan penagihan utang terhadap debitur dan jika debitur wanprestasi, maka kreditur baru

mempunyai hak untuk melakukan eksekusi atas benda-benda debitur yang dibebani dengan jaminan seperti gadai, hipotek, dan hak tanggungan;(Kusumasari, 2011)

- d. Penyelesaian secara sukarela (*amicable settlement*) yaitu penyerahan objek jaminan atas dasar kerelaan dari debitur.

Namun apabila kebijakan tersebut tetap dihiraukan oleh *Lessee* dan tidak menemukan solusi, maka perusahaan pembiayaan PT ASF akan mengambil atau menyita barang tersebut dengan bantuan pihak ketiga (*debt collector*). (Tim Peneliti, 2021) Dalam penagihan kredit macet yang dilakukan oleh penagih hutang ini didasari dengan adanya pemberian kuasa dari pihak perusahaan pembiayaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1792 KUH Perdata bahwa:

"Pemberian Kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan sesuatu".

Dengan adanya pengertian pemberian kuasa tersebut, hal ini menyatakan bahwa pemberian kuasa kepada pihak ketiga untuk melakukan penagihan pada *Lessee* yang lalai dalam membayar kewajiban hutangnya adalah sah berdasarkan hukum. Hal tersebut diatur pula didalam Pasal 48 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan menyatakan bahwa:

"Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur".

Ketentuan kerja sama dengan pihak lain diatur pada Pasal 48 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 yang menyatakan bahwa:

“kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Pihak lain tersebut berbentuk badan hukum;

Pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang; dan

Pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang pembiayaan”.

Dengan demikian, Otoritas Jasa Keuangan memperbolehkan lembaga pembiayaan menggunakan jasa pihak ketiga dalam penagihan hutang dan tidak ada larangan secara tegas mengenai penggunaan jasa pihak ketiga. Apabila pada saat eksekusi obyek leasing, Lessee/Debitur melawan atau tidak bersedia menyerahkan obyek tersebut atau obyek tersebut secara sepihak dialihkan kepada pihak lain maka perusahaan pembiayaan dapat melaporkan Lessee dan menempuh jalur pengadilan.(Tim Peneliti, 2021)

Dengan demikian, dalam hal terjadi perselisihan terdapat dua cara yang dapat dipakai untuk menyelesaikan perselisihan tersebut yaitu para pihak sepakat bahwa sengketa yang terjadi akan diselesaikan melalui musyawarah, dan apabila musyawarah tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut di Pengadilan Negeri.

Eksekusi jaminan terhadap obyek leasing diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.(Republik Indonesia, 1999) Dalam UU tersebut diatur bahwa kreditur yang sudah menerima penyerahan fidusia dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan sudah mendapatkan sertifikat fidusia, maka eksekusi dapat segera dilaksanakan tanpa melalui pengadilan karena sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono, bahwa kekuatan eksekutorial atas sertifikat jaminan fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk dapat mengeksekusi jaminan fidusianya dengan syarat debitur atau pemberi fidusia cidera janji.(Dewi, Saptanti, & Purwadi, 2017) Namun ternyata pemaknaan yang timbul dalam Pasal 15 ayat (2) tersebut disinyalir membuat pemberi fidusia dirugikan sehingga pada tanggal 24 Maret 2019, diajukan permohonan uji materiil UU Nomor 42 Tahun 1999 ke Mahkamah Konstitusi, hingga akhirnya pada tanggal 6 Januari 2020 Mahkamah Konstitusi memutuskan permohonan tersebut.

Dalam amar putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 memberikan perubahan makna terhadap bunyi Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3). Dalam amar putusannya menyatakan bahwa: (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2019)

1. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan

eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

2. *Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”;*
3. *Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-126 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan*

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

Bahwasanya pemaknaan terhadap Pasal 15 ayat (2) yaitu terlebih dahulu harus dilakukan kesepakatan terhadap cidera janji (*wanprestasi*) antara pemberi dan penerima fidusia, serta pihak pemberi fidusia harus dengan sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, barulah eksekusi dapat dilakukan. Jika kedua hal tersebut tidak dapat disepakati oleh para pihak maka eksekusi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian pemaknaan terhadap Pasal 15 ayat (3) bahwa cidera janji (*wanprestasi*) harus ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak, artinya klausula cidera janji harus dibahas lebih detail antara para pihak dengan tujuan menyepakati dan saling memahami mengenai *wanprestasi* dalam perjanjian pokok dan perjanjian tambahan (perjanjian utang piutang dan akta pembebanan jaminan fidusia). Klausula cidera janji harus dituangkan dalam perjanjian pokok, dan notaris dalam membuat akta jaminan fidusia dapat memastikan bahwa kedua belah pihak mengerti mengenai cidera janji yang tertuang dalam perjanjian pokok. Namun jika klausula mengenai cidera janji tidak jelas dan tidak adanya kesepakatan antara para pihak, maka dapat dilakukan berdasarkan upaya hukum. Upaya hukum harus ditempuh guna mendapat kepastian hukum apakah pemberi fidusia telah melakukan cidera janji pada perjanjian utang piutang antara kedua belah pihak (Febriyanti, 2020).

Jika diperhatikan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, apabila terdapat pertanyaan bagaimana jika pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang telah menyepakati adanya cidera janji secara jelas, namun debitur tetap keberatan menyerahkan secara sukarela objek fidusia tersebut maka hal tersebut dapat dilihat pendapat

MK “Perjanjian Jaminan Fidusia harus memenuhi asas kepastian hukum dan rasa keadilan, berupa telah adanya keseimbangan hak hukum antara pemberi hak fidusia (Debitur) dan penerima fidusia (Kreditur)” (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2019, p. 121) sejalan dengan pertimbangan MK, prinsip tersebut merupakan salah satu alasan utama penghormatan sebuah kesepakatan. Asas keseimbangan tersebut tidak diwujudkan dari kesamaan jumlah hak dan kewajiban bagi para pihak, akan tetapi lebih kepada pembagian porsi hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian dan implementasi asas tersebut diwujudkan dalam bentuk perumusan klausul mengenai “penyerahan sukarela benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia” dari Debitur kepada Kreditur sebagai akibat terjadinya peristiwa cidera janji (*wanprestasi*).

Kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, tetap mengikat dan pelaksanaan eksekusinya tunduk pada Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31. Hal tersebut mendasarkan pada pertimbangan berikut:

- 1) Klausul/Perjanjian tersebut telah memenuhi Asas Proporsionalitas

Dengan merumuskan klausul “cidera janji/*wanprestasi*” dan “penyerahan sukarela Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia” berdasarkan “kesepakatan” / tidak didasarkan semata-mata pada “kewajiban salah satu pihak yang disebutkan dalam UU Fidusia” hal ini telah menempatkan para pihak dalam penyusunan perjanjian jaminan fidusia berada dalam posisi yang seimbang, sehingga kesepakatan yang terjadi dalam keadaan tersebut harus dihargai kedudukannya secara hukum, sebagai suatu aturan yang mengikat bagi para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata. Sehingga keberatan Debitur untuk menyerahkan secara sukarela objek yang

menjadi jaminan fidusia pada saat terjadinya “cidera janji/*wanprestasi*” tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, mengingat sedari awal perjanjian tersebut telah memenuhi asas kepastian hukum dan rasa keadilan, berupa telah adanya keseimbangan hak hukum antara pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur).

- 2) Klausul /Perjanjian tersebut telah memenuhi Asas Itikad Baik

Perjanjian atau kontrak sebagai wadah yang mempertemukan kepentingan satu pihak dengan pihak lain sejatinya menuntut bentuk pertukaran kepentingan yang adil dan patut yang harus dilaksanakan berdasarkan itikad baik, hal tersebut merupakan pokok pikiran penting yang menjelaskan korelasi erat antara Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata dengan Pasal 1339 KUH Perdata. Pasal tersebut merupakan landasan berlakunya Asas Itikad Baik terhadap seluruh perjanjian yang dibuat berdasarkan hukum Indonesia, serta membatasi pemahaman Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Konsensualisme. Singkatnya, Asas kebebasan berkontrak tidak dapat ditafsirkan hanya pada keuntungan salah satu pihak (*terlebih keuntungan pihak yang telah cidera janji untuk penyerahan obyek secara sukarela*), akan tetapi secara wajar harus menjamin terpenuhinya kepentingan pihak lain dalam pelaksanaan perjanjian sesuai Asas Itikad baik. (Erco Law, 2020)

Dengan demikian, pelaksanaan eksekusi langsung objek leasing oleh perusahaan pembiayaan untuk menarik objek jaminan fidusia, terhadap perjanjian sebagaimana dijelaskan di atas tetap dapat dilakukan sepanjang pelaksanaan eksekusinya dilakukan berdasarkan Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan tunduk pada peraturan perundang-undangan lain yang terkait, termasuk dan tidak terbatas Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Optimalisasi terhadap Lessee yang melakukan wanprestasi

Lessor selaku aktor dibidang perusahaan pembiayaan sangat membutuhkan optimalisasi terhadap *Lessee* yang melakukan wanprestasi pada setiap perjanjian leasing yang terjadi. Mengingat objek yang diperjanjikan dalam suatu kontrak adalah sebuah kendaraan bermotor. Sebuah kendaraan bermotor tersebut memiliki nilai yang akan menurun setiap tahunnya.

Tahun keluaran mobil akan menentukan besar penurunan harga sehingga berpengaruh pula pada harga penjualan. Pada umumnya, besar penurunan harga makin tahun akan makin kecil. Misalnya, pada tahun pertama setelah tahun keluaran mobil, harga jual kendaraan Anda akan turun sebesar 10 hingga 15 persen. Pada tahun kedua, akan turun sebesar 5 hingga 10 persen. Pada tahun ketiga, akan turun sebesar 5 hingga 8 persen, demikian seterusnya.(Olga, 2019)

Lessor akan sangat dirugikan apabila *Lessee* melakukan wanprestasi terhadap kontrak yang telah disepakati. Disatu sisi nilai jual objek yang akan terus menurun disetiap tahunnya sesuai dengan kondisi fisik objek, belum lagi ditambah dengan proses persidangan di Indonesia yang cukup memakan waktu yang cukup lama. Bahkan paling singkat itu memakan 1 tahun, 1 tahun itupun sudah menimbulkan penurunan nilai jual terhadap objek perjanjian. Pemerintah sebagai regulator pada setiap kegiatan perekonomian di Indonesia perlu mengakomodir kebutuhan dari sektor swasta ini.

Pajak kendaraan bermotor yaitu pengenaan pajak yang dipotong mengenai dasar kepemilikan/penguasaan kendaraan

bermotor yang dibayar oleh pemilik setiap tahunnya. Kendaraan Bermotor merupakan kendaraan yang diberi energi melalui mesin dan digunakan untuk transportasi darat, serta dipergunakan melalui peralatan teknis berbentuk motor listrik maupun alat lain yang mempunyai fungsi melakukan perubahan sebuah sumber energi kepada tenaga untuk menggerakkan kendaraan.(Aswati, Mas'ud, & Nudi, 2018) Pajak kendaraan bermotor memiliki manfaat bagi daerah yaitu: (Kusumawati & Rachman, 2021)

1. Sumber pendapatan daerah.
2. Mendanai penyelenggaraan pemerintah daerah
3. Untuk pemeliharaan dan pembangunan jalan dan peningkatan sarana
4. transportasi umum untuk masyarakat.
5. Dapat membantu peningkatan pendapatan Kabupaten/Kota.
6. Berguna untuk meningkatkan kepastian hukum dan ketenangan bagi Wajib Pajak.

Pemerintah sudah seharusnya mengakomodir kepentingan *Lessor* sebagai penyumbang pajak negara dari segi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Apabila dalam segi penegakan hukum terhadap *Lessee* yang melakukan wanprestasi hanya mengharapkan proses pengadilan biasa tanpa ada inovasi didalamnya maka akan memakan waktu yang cukup lama hingga putusan dari kasus tersebut memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Apabila merujuk kepada Asas peradil cepat, sederhana, biaya dan ringan telah diatur dalam undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menggantikan Undang-undang No. 4 tahun 2004 yang menggantikan Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 yang dalam pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa peradil membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan

untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. (Kaimuddin, 2015)

Praktik peradilan di Indonesia berdasarkan pada asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, asas tersebut bersifat universal yang dalam peradlan di Indonesia harus menjunjung tinggi asas tersebut. Asas ini mempunyai makna acara yang tidak berbelit-belit, waktu yang efektif dan biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat umum, dalam praktik banyak sekali peradilan yang belum mencerminkan asas tersebut, Robert N. Cole-o Lee Reed berpendapat bahwasanya lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa kerap mengalami beban yang terlalu padat, lamban dan buang waktu, biaya mahal dan kurang tanggap terhadap kepentingan umum, atau dianggap terlampaui formalitas dan teknis. (Shidiq, Afandi, & Kaimuddin, 2021)

Selaras dengan kebutuhan Lessor dimana membutuhkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan memakan biaya yang ringan, maka dibutuhkan inovasi terhadap penyelesaian sengketa khusus mengenai Tindakan Lessee yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian Leasing. Hal ini dikarenakan sudah jelas dalam kontrak yang berisikan dari kedua belah pihak untuk sama sama tunduk dan wajib mengikutisetiap butir kesepakatan yang ada didalamnya. Namun hal dilapangan sering kali terjadi hal yang berbeda ketika Lessor melalui debt collector hanya berusaha untuk menagih hak yang sudah diperjanjikan dalam kontrak. Terdapat beberapa jejak digital yang terjadi di Tahun 2021 antara lain:

1. *"Kejadian DC diamuk warga tersebut ramai diperbincangkan masyarakat dan tentunya para warganet. Akibatnya 3unit motor yang dilemparkan ke sungai mengalami*

kerusakan cukup parah. Bahkan beberapa orang DC pun mengalami luka-luka." (Ramadhan, 2021)

2. *"Kasus pengeroyokan tersebut terjadi karena ada pemeriksaan sepeda motor milik warga oleh debt collector. keberadaan debt collector di lokasi kejadian membuat warga resah karena sering memberhentikan motor milik warga yang melintas. Kawan debt collector tersebut memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan warga. sehingga pemilik sepeda motor dan warga melakukan penyerangan ke tempat kumpul debt collector."* (Juhariyono, 2021)
3. *"Diduga maling, pria yang berprofesi sebagai debt collector atau penagih utang sempat diteriaki maling, sebelum nekat menceburkan diri ke Kali Ciliwung, Gunung Sahari, Jakarta Pusat."* (Lesmana & Hutasuhut, 2021)

Melihatnya banyaknya debt collector yang hanya menjalankan tugas dari perusahaan hingga menjadi sasaran persekusi warga. Faktanya, kebanyakan warga yang disambangi debt collector melanggar kontrak dari perjanjian leasing yang sudah disepakati kedua belah pihak. Mahkamah Konstitusi mengkonfirmasi terkait putusan jaminan fidusia, jika penunggak telah mengakui adanya cedera janji dan dengan sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusianya, leasing punya kewenangan penuh melakukan eksekusi sendiri. (Makki, 2020) Namun hal jarang terjadi di masyarakat. Pemerintah perlu melakukan perubahan terhadap peradilan terkait wanprestasi yang dilakukan leasing, pemerintah bisa mencontoh proses peradilan tilang yang sederhana dan tidak memakan waktu yang lama. Sebelum perjanjian leasing ditandatangani kedua belah pihak, data kemampuan Lessee untuk melaksanakan perjanjian sudah dianalisa melalui analis kredit dan dipastikan melalui surveyor, Dapat

dipastikan mengenai kesanggupan pembayaran *Lessee* terhadap cicilannya, hal ini hanya berkaitan dengan itikad baik dari *Lessee* untuk melaksanakan pembayaran tepat waktu, apabila terjadi keterlambatan ataupun wanprestasi seharusnya hanya diakibatkan *force major/overmacht*.

SIMPULAN

Terdapat serangkaian prosedur yang harus ditempuh oleh *Lessor* terlebih dahulu dalam proses penyelesaian tindakan *Lessee* yang wanprestasi yakni pemberian peringatan somasi, memberikan kebijaksanaan kredit, hingga menyita objek jaminan dengan bantuan pihak ketiga atau *debt collector*. Penyitaan objek jaminan tersebut didasari oleh kekuatan eksekutorial sebagaimana yang tercantum pada Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, serta pelaksanaan eksekusinya yang tercantum Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 UU Jaminan Fidusia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah ditegaskan pula bahwa dalam implementasinya, asas kepastian hukum dan rasa keadilan harus ditegakkan pada pembagian porsi hak dan kewajiban antara *Lessee* dengan *Lessor* dalam hal eksekusi objek jaminan fidusia. Bahwa serangkaian prosedur pengadilan yang diwajibkan ditempuh oleh *Lessor* dalam eksekusi objek jaminan, dinilai tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, biaya dan ringan telah diatur dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mengingat fakta bahwa kendaraan bermotor yang dijadikan objek jaminan akan selalu mengalami penyusutan nilai dan harga seiring dengan berjalannya proses pengadilan. Maka dalam hal ini, pemerintah perlu sekiranya membentuk

suatu peradilan singkat yang tentunya lebih sederhana dan tidak menyita waktu yang lama. Hal ini guna meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan eksekutorial yang dilakukan oleh pihak *Lessor*, sehingga *Lessee* yang telah melakukan tindak wanprestasi dapat segera dikenakan sanksi dan *Lessor* tidak mengalami kerugian yang berarti atas objek jaminan fidusia yang telah diberikannya.

DAFTAR PUSTAKA

- ACC. (2020). ACC One. Retrieved June 14, 2021, from acc.co.id website: https://www.acc.co.id/accone/TentangACC_Detail?Detail=U2FsdGVkX1%2B0ZfGD%2FwMpQI6z1b0TOWG%2FxfjLhrX2MDbjOD0pcnsEfZSgpy9yhGZXGac%2BYHfIA4UMTFZ%2BDRqo4%2BQUjFUWKwnHbJjwyxILTelDO9fExtwtY4Zi8Iy
- Aprilianti, A. (2015). Perjanjian Sewa Guna Usaha Antara *Lessee* Dan *Lessor*. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(3), 315–323.
- Aswati, W. O., Mas'ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 27–39.
- Badriyah, S. M. (2011). *Pemuliaan (Breeding) Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Objek Barang Modal Yang Berkembang Di Masyarakat (Studi Tentang Perjanjian Leasing Di Indonesia)*. Tesis.. Universitas Diponegoro.
- Bhudiman, B. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Leasing Pada Pt. Era Cepat Transportindo. *Jurnal Yustisi*, 3(2), 1–12.
- Breslauer, P. (1992). Finance Lease Hell or High Water Clause and Third Party Beneficiary Theory in Article 2A of the Uniform Commercial Code. *Cornell Law Review*, 77(2), 318–349.
- Cooluris, J. G. (1982). Consumer Leasing. *American Bar Association*, 37(3), 1134–1137.
- Dewi, R. P., Saptanti, N., & Purwadi, H. (2017). Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Jurnal Repertorium Volume*, 4(1), 73–81.
- Eisfeldt, A. L., Rampini, A. A., Eisfeldt, A. L., & Rampini, A. A. (2009). The Society for

- Financial Studies Leasing , Ability to Repossess , and Debt Capacity Published by : Oxford University Press. *The Review of Financial Studies*, 22(4), 1621–1657.
- Erco Law. (2020). "Leasing" Masih Bisa Tarik Aset, Anotasi Putusan MK Tentang Fidusia No. 18/PUU-XVII/2019". Retrieved June 14, 2021, from ercolaw.com website: <https://ercolaw.com/leasing-masih-bisa-tarik-aset-anotasi-putusan-mk-tentang-fidusia-no-18-puu-xvii-2019/>
- Faber, D., & Schuijling, B. (2007). *Financial Leasing and Its Unification by Unidroit D. Faber & B. Schuijling*. (August 2003), 1–19.
- Febriyanti, W. D. R. (2020). Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 6(2), 39–52.
- Gross, E. K., Liberatore, D. A., & Whelan, S. T. (2015). Lease. *The Business Lawyer*, 70(4), 1183–1196.
- Hrf/sfr. (2020). Kemendag Catat 1.354 Sengketa Konsumen Terkait Pembiayaan. Retrieved February 11, 2021, from cnnindonesia website: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201027145600-92-563305/kemendag-catat-1354-sengketa-konsumen-terkait-pembiayaan>
- Jafar. (2004). *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Lessor Dalam Perjanjian Leasing (Sewa Guna Usaha)* (Pascasarjana Universitas Diponegoro). Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Juhariyono, A. (2021). Polisi Selidiki Kasus Pengeroyokan Debt Collector di Tasikmalaya. Retrieved June 14, 2021, from iNews.id website: <https://jabar.inews.id/berita/polisi-selidiki-kasus-pengeroyokan-debt-collector-di-tasikmalaya>
- Kaimuddin, A. (2015). Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan. *Arena Hukum*, 8(2), 258–279.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha*. , (1991). Jakarta.
- Kusumasari, D. (2011). Permasalahan Cessie dan Subrogasi. Retrieved June 14, 2021, from hukumonline.com website: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3400/permasalahan-cessie-dan-subrogasi>
- Kusumawati, I. N., & Rachman, A. N. (2021). ANALISA PENGARUH WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK. *Jurnal Ekonomi-QU*, 11(1), 1–20.
- Lesmana, A. S., & Hutasuhut, Y. A. A. (2021). Dikejar-kejar Warga, Debt Collector Nekat Terjun ke Kali Ciliwung. Retrieved June 14, 2021, from Suara.com website: <https://www.suara.com/news/2021/04/20/134502/ambil-paksa-motor-cewek-awal-debt-collector-dikejar-hingga-nyebur-ke-kali?page=all>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2019). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*. Jakarta.
- Makki, S. (2020). Leasing Bisa Tarik Kendaraan Kredit Macet Tanpa Pengadilan. Retrieved June 14, 2021, from CNN Indonesia website: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/2020114172622-384-465299/leasing-bisa-tarik-kendaraan-kredit-macet-tanpa-pengadilan>
- Mohamedien, G. W. . (2002). Legal Aspects of Leasing : A Critical Review of Egyptian Law No . 95 of 1995 on Finance Lease. *Arab Law Quarterly*, 17(95), 108–149.
- Olga. (2019). Ingin Menjual Mobil Bekas? Pastikan Pahami Cara Menentukan Harga! Retrieved June 10, 2021, from Caroline.id website: <https://www.caroline.id/berita/cara-menentukan-harga-jual-mobil-bekas/>
- Peter, S. W. (2010). Financial Leasing of Equipment in the Law of the United States. *The American Journal of Comparative Law*, 58, 323–351.
- Ramadhan, A. S. (2021). Detik-detik Warga Ngamuk Lempar Motor Milik Debt Collector ke Sungai. Retrieved June 14, 2021, from SuaraJabar.id website: <https://jabar.suara.com/read/2021/04/08/151500/detik-detik-warga-ngamuk-lempar-motor-milik-debt-collector-ke-sungai>
- Republik Indonesia. *Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, LN Nomor 168, TLN Nomor 3889*. , (1999). Jakarta.
- Rojc, K., & Stendahl, K. E. (2004). Vicarious Liability of Motor Vehicle Lessors. *American Bar Association*, 59(3), 1161–1177.
- Shidiq, A. Z., Afandi, & Kaimuddin, A. (2021). SISTEM E-COURT SEBAGAI WUJUD IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27(3), 331–349.
- Silondae, A. A., & Fariana, A. (2010). *Aspek Hukum dalam Ekonomi & Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Soemitro. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Sunaryo. (2008). *Hukum Lembaga Pembiayaan (I)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suryani, L. P., Hukum, F., Warmadewa, U., & Kendaraan, P. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Pengusaha Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor Yang Dirugikan Oleh Konsumen Pada Perusahaan Paulus Rental Bike Kabupaten Badung*. 1(1), 234–238.
- Tim Peneliti. (2021). *Wawancara dengan Bapak R. Bagus Dwiantho selaku Corporate Secretary & Corporate Counsel Division Head PT Astra Sedaya Finance, 20 Mei 2021*. Jakarta.
- Triwanto. (2019). Perlindungan Hukum Konsumen Leasing Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit. *Jurnal Research Fair Unsri* 3, 3(1), 355–364.
- Waode, D. D. S. (2018). Upaya Hukum Dan Penyelesaian Akibat Wanprestasi Serta Overmacht Dalam Perjanjian Pembiayaan. *Dedikasi Jurnal Mahasiswa*, 1(1), 746–749.
- Yulianti, C. E. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM PERUSAHAAN LEASING TERHADAP TERJADINYA PENGGELAPAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Dinamika*, 25(1), 1–15.